JADMENT: *Journal of Administration & Development*
Published by Penerbit Forind
Vol. 3 No. 3 (2026) | Page 701-709
Website: https://jadment.forindpress.com/index.php/jadment

PENGUATAN TATA KELOLA KAWASAN PESISIR MELALUI REVITALISASI PARIWISATA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT: STUDI KOMPARATIF PANTAI CAMPLONG DAN DESA BRANTA PESISIR

Strengthening Coastal Governance Through Tourism Revitalization and Community Empowerment: A Comparative Study of Camplong Beach and Branta Pesisir Village

Abdul Azis[1*]
Moh Danil[1]
Moh. Haris[1]
Siti Ro'i[1]
Belqis Risky W[1]
Rina Nur Azizah[1]

[1]Universitas Madura, Pamekasan

[*]corresponding author: kingabiz1585@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan membandingkan kebutuhan penguatan tata kelola kawasan pesisir di Pantai Camplong dan Desa Branta Pesisir. Permasalahan utama yang dikaji ialah perbedaan fungsi kedua wilayah yang menuntut prioritas revitalisasi berbeda, sementara keduanya membutuhkan koordinasi dan keterlibatan masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan desain studi kasus komparatif berbasis telaah dokumen laporan kuliah lapangan dan literatur Indonesia. Data dianalisis melalui pengelompokan isu, perbandingan antarlokasi, interpretasi berdasarkan teori, serta penyusunan strategi dan indikator pemantauan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pantai Camplong membutuhkan perhatian pada pemeliharaan fasilitas, kebersihan, dan kepastian tanggung jawab pelayanan. Desa Branta Pesisir membutuhkan pengelolaan sampah yang terhubung dengan aktivitas perikanan serta penguatan usaha masyarakat. Kajian ini menghasilkan rancangan program bertahap, bukan evaluasi keberhasilan program yang telah dilaksanakan. Karena data primer berupa transkrip wawancara, pengukuran lingkungan, dan statistik kunjungan belum tersedia, seluruh temuan perlu diverifikasi melalui penelitian lapangan dan konsultasi dengan pemangku kepentingan.

Kata Kunci:
Revitalisasi
Tata kelola pesisir
Pariwisata
Pemberdayaan masyarakat
Madura

Keywords:
Coastal governance
Community empowerment
Coastal tourism
Revitalization
Madura

Abstract

This study compares coastal governance needs in Camplong Beach and Branta Pesisir Village. It addresses the different functions of the two areas, which require distinct revitalization priorities while sharing the need for coordination and community participation. The study applies a qualitative descriptive approach with a comparative case-study design, drawing on fieldwork documents and Indonesian literature. Data were analyzed by classifying issues, comparing the two locations, interpreting findings through relevant concepts, and formulating strategies and monitoring indicators. The findings indicate that Camplong Beach requires attention to facility maintenance, cleanliness, and clear responsibility for visitor services. Branta Pesisir Village requires waste management linked to fisheries activities and support for community enterprises. The study proposes phased interventions rather than evaluating an implemented program. Since interview transcripts, environmental measurements, and visitor statistics were not available, the findings require field verification and consultation with relevant stakeholders.

© year The Authors. Published by **Penerbit Forind**. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Link: https://jadment.forindpress.com/index.php/jadment

Submite: 04-11-2026 *Accepted: 20-11-2026* *Published: 23-11-2026*

PENDAHULUAN

Wilayah pesisir mempunyai fungsi yang saling berkaitan sebagai ruang ekologis, tempat tinggal, pusat produksi, dan lokasi rekreasi. Perubahan pada satu fungsi dapat memengaruhi fungsi lainnya. Penurunan kualitas lingkungan, misalnya, berpotensi mengurangi kenyamanan wisata sekaligus mengganggu kegiatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan kawasan pesisir tidak cukup hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga perlu memperhatikan kelembagaan, keberlanjutan, dan keterlibatan warga. Dalam pengembangan destinasi, Sunaryo (2013) menekankan keterpaduan daya tarik, aksesibilitas, fasilitas, dan pengelolaan. Kerangka tersebut relevan untuk membaca kebutuhan Pantai Camplong yang dalam dokumen kuliah lapangan dicatat memiliki persoalan pemeliharaan sarana dan kebersihan. Namun, tanpa data

kunjungan yang terukur, persoalan tersebut belum dapat dinyatakan sebagai penyebab perubahan jumlah wisatawan.

Desa Branta Pesisir memiliki karakter yang berbeda karena aktivitas nelayan, perdagangan hasil tangkapan, kehidupan permukiman, dan persoalan sampah menjadi isu yang saling berhubungan. Prayogi dan Sari (2019) menempatkan pemberdayaan nelayan sebagai bagian penting dalam pengembangan kawasan pesisir. Dengan demikian, pemberdayaan tidak seharusnya berhenti pada pelatihan usaha, tetapi perlu mempertimbangkan pola kerja, kebutuhan, dan sumber daya masyarakat. Sejumlah kajian membahas pariwisata berbasis masyarakat, partisipasi warga, dan pengelolaan lingkungan pesisir. Namun, artikel ini memusatkan perhatian pada perbandingan dua lokasi di Kabupaten Sampang yang memiliki fungsi dominan berbeda: Pantai Camplong sebagai kawasan rekreasi dan Branta Pesisir sebagai kawasan permukiman serta kegiatan ekonomi perikanan. Kesenjangan kajian yang hendak diisi ialah kebutuhan merumuskan prioritas revitalisasi yang spesifik menurut karakter lokasi, sekaligus mengidentifikasi kebutuhan tata kelola yang sama. Urgensi kajian terletak pada perlunya usulan program yang tidak seragam dan dapat diperiksa pelaksanaannya. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan: (1) mengidentifikasi isu utama yang tercatat dalam dokumen lapangan; (2) membandingkan kebutuhan revitalisasi Pantai Camplong dan Branta Pesisir; (3) menafsirkan isu tersebut menggunakan literatur nasional; dan (4) menyusun rancangan strategi pemberdayaan serta indikator pemantauan awal. Kontribusi artikel adalah kerangka operasional yang dapat menjadi bahan verifikasi dan konsultasi lebih lanjut, bukan klaim keberhasilan intervensi.

Revitalisasi dalam artikel ini dimaknai sebagai upaya memulihkan dan meningkatkan fungsi ruang yang telah ada melalui perbaikan fasilitas, pengelolaan, dan kualitas layanan. Penekanan pada pemulihan fungsi penting agar pembangunan baru tidak mendahului pemeriksaan kebutuhan nyata. Sunaryo (2013) menunjukkan bahwa pembangunan destinasi perlu memperhatikan hubungan antara produk wisata, pengelola, dan masyarakat di sekitarnya. Berdasarkan kerangka tersebut, kondisi destinasi dapat dibaca melalui empat dimensi: kelayakan sarana dasar, keteraturan pemeliharaan, kejelasan informasi layanan, dan mekanisme penanganan keluhan. Dimensi ini digunakan sebagai alat analisis, bukan sebagai hasil pengukuran lapangan yang sudah lengkap.

Pemberdayaan dipahami sebagai proses memperluas kemampuan warga dalam mengidentifikasi kebutuhan, menentukan keputusan, dan memperoleh manfaat dari kegiatan ekonomi. Prayogi dan Sari (2019) memberikan dasar untuk melihat nelayan sebagai pelaku utama, bukan sekadar penerima program. Keterlibatan warga juga penting untuk mengurangi risiko rancangan kegiatan yang tidak sesuai dengan pola kerja dan sumber daya lokal. Dalam konteks Branta Pesisir, pendekatan ini mendorong pengaitan pengelolaan sampah dengan peningkatan mutu produk perikanan, akses informasi pasar, dan penguatan organisasi kelompok. Usulan tersebut harus diuji bersama pelaku usaha karena kapasitas modal, waktu kerja, dan minat warga belum terdokumentasi secara rinci. Penguatan ekonomi masyarakat juga dapat dilakukan dengan memperhatikan pengembangan usaha mikro lokal. Azizah et al. (2026), melalui kegiatan pendampingan pada UMKM jajanan pasar di Desa Dasok, Pamekasan, mengemukakan strategi penguatan branding dan kemasan, pemanfaatan media sosial untuk pemasaran, serta inovasi produk dengan tetap mempertahankan ciri khas lokal. Temuan tersebut dapat menjadi pembanding dalam merancang pemberdayaan pelaku usaha di Branta Pesisir, meskipun jenis usaha dan kondisi kedua wilayah berbeda.

Tata kelola kolaboratif dipakai sebagai sudut pandang untuk menempatkan pemerintah, pengelola kawasan, pelaku usaha, dan masyarakat dalam proses perencanaan serta evaluasi. Prinsipnya bukan sekadar mengundang banyak pihak, tetapi menetapkan

kewenangan, pembagian tugas, jadwal kerja, dan pertanggungjawaban yang dapat diperiksa. Kerangka ini merupakan sintesis analitis penulis atas kebutuhan kedua lokasi. Keberlanjutan dinilai dari kemungkinan kegiatan tetap berjalan setelah tahap awal selesai. Oleh sebab itu, indikator keberhasilan perlu mencakup perubahan fungsi fasilitas, kebersihan, keterlibatan masyarakat, dan keberlangsungan usaha, bukan hanya jumlah kegiatan seremonial.

METODE PENELITIAN

Desain dan unit analisis

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan desain studi kasus komparatif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami persoalan sosial dan tata kelola berdasarkan konteks yang tercatat dalam dokumen, sejalan dengan prinsip penelitian kualitatif yang dijelaskan Sugiyono (2018). Unit analisis terdiri atas dua lokasi, yaitu Pantai Camplong sebagai kawasan rekreasi pesisir dan Desa Branta Pesisir sebagai kawasan permukiman serta kegiatan ekonomi perikanan. Perbandingan dilakukan pada aspek fungsi kawasan, fasilitas dan pelayanan, kebersihan lingkungan, kegiatan ekonomi, partisipasi masyarakat, serta kebutuhan koordinasi.

Sumber data dan batasannya

Sumber data utama adalah naskah laporan kuliah lapangan yang menjadi dasar penyusunan artikel kelompok. Data pendukung diperoleh melalui telaah buku dan artikel ilmiah Indonesia yang relevan dengan revitalisasi destinasi, pemberdayaan masyarakat pesisir, partisipasi, dan pengelolaan lingkungan. Dokumen lapangan memuat gambaran fasilitas, kebersihan, kegiatan perikanan, dan budaya lokal. Akan tetapi, dokumen yang tersedia tidak menyertakan seluruh transkrip wawancara, identitas informan, instrumen pengumpulan data, hasil pengukuran lingkungan, atau deret statistik kunjungan wisata. Oleh sebab itu, sumber utama dalam artikel ini diperlakukan sebagai data dokumenter, bukan sebagai hasil wawancara langsung yang dapat dikutip.

Teknik pengolahan dan analisis

Analisis dilakukan melalui lima tahapan. Pertama, seluruh keterangan dalam dokumen kuliah lapangan dibaca dan ditandai sesuai isu fasilitas, pelayanan, lingkungan, ekonomi, budaya, dan kelembagaan. Kedua, informasi yang relevan dikelompokkan berdasarkan masing-masing lokasi. Ketiga, kedua lokasi dibandingkan untuk menemukan persamaan dan perbedaan kebutuhan. Keempat, hasil perbandingan ditafsirkan dengan konsep revitalisasi destinasi, pemberdayaan masyarakat, tata kelola kolaboratif, dan keberlanjutan yang dibahas dalam literatur. Kelima, hasil interpretasi diterjemahkan menjadi usulan program, pihak yang berpotensi bertanggung jawab, serta indikator pemantauan. Analisis dilakukan secara deskriptif; tidak digunakan perhitungan statistik karena data kuantitatif yang diperlukan tidak tersedia.

Keabsahan dan etika

Keabsahan analisis dijaga dengan memisahkan tiga hal, yaitu keterangan yang tercatat dalam dokumen, interpretasi penulis, dan rekomendasi yang diusulkan. Keterangan yang belum didukung dokumen resmi atau pengukuran langsung, seperti rincian kerja sama pengelolaan, besaran dampak ekonomi, dan volume sampah, tidak dinyatakan sebagai fakta terukur. Penelitian ini merupakan kajian dokumenter sehingga tidak memiliki informan wawancara yang dapat disebutkan dan tidak menyajikan kutipan wawancara langsung. Untuk memenuhi kebutuhan verifikasi empiris pada tahap penelitian lapangan berikutnya, calon informan yang relevan meliputi pengelola Pantai Camplong, perangkat desa, pemerintah daerah/instansi terkait, nelayan, pedagang ikan, pelaku usaha olahan, dan warga sekitar. Pemilihan informan perlu dilakukan secara purposif berdasarkan keterlibatan mereka pada isu yang diteliti. Wawancara, persetujuan penggunaan

informasi, pemeriksaan dokumen resmi, dan konfirmasi silang antarsumber harus dilakukan sebelum kutipan atau klaim empiris ditambahkan.

HASIL

Masalah fungsi fasilitas dan pengalaman pengunjung

Dokumen kuliah lapangan menggambarkan Pantai Camplong sebagai kawasan rekreasi dengan sejumlah fasilitas yang memerlukan perhatian pemeliharaan. Catatan mengenai sampah dan kondisi sarana merupakan indikasi awal adanya kebutuhan pemeriksaan kualitas fasilitas dan pelayanan. Akan tetapi, dokumen yang tersedia belum dilengkapi inventaris teknis, hasil inspeksi terukur, maupun survei kepuasan pengunjung. Dengan demikian, keterangan tersebut merupakan temuan dokumenter awal dan belum dapat digunakan untuk menyimpulkan tingkat kualitas seluruh kawasan.

Berdasarkan catatan tersebut, kebutuhan pemeriksaan meliputi kondisi toilet, tempat sampah, jalur pejalan kaki, area berteduh, papan informasi, dan akses pelayanan. Setiap fasilitas perlu dicatat menurut lokasi, fungsi, kondisi, tingkat urgensi, dan pihak yang bertanggung jawab. Prioritas awal yang diusulkan adalah keselamatan, sanitasi, dan aksesibilitas dasar. Penambahan fasilitas baru sebaiknya dipertimbangkan setelah kebutuhan pemulihan fasilitas yang sudah ada teridentifikasi. Rincian kondisi setiap fasilitas masih harus dikonfirmasi melalui observasi langsung.

Tata kelola pemeliharaan

Ketersediaan fasilitas tidak otomatis menjamin kualitas layanan apabila pemeliharaan tidak didukung jadwal, petugas, dan sumber pembiayaan yang jelas. Kerangka pengembangan destinasi Sunaryo (2013) menekankan keterkaitan antara produk wisata, pengelola, dan masyarakat sekitar. Dalam konteks Pantai Camplong, kerangka tersebut menunjukkan bahwa pemeliharaan perlu dibicarakan bersama oleh pengelola, pemerintah terkait, dan pelaku usaha. Pembagian tanggung jawab sebaiknya dituangkan dalam kesepakatan tertulis yang memuat jenis pekerjaan, jadwal, penanggung jawab, sumber daya, dan mekanisme pelaporan.

Dokumen awal belum menyediakan bukti yang cukup untuk memastikan bentuk kerja sama, status kontrak, atau pembagian kewenangan formal. Karena itu, artikel ini tidak menarik kesimpulan hukum mengenai kepemilikan maupun pengelolaan kawasan. Pemeriksaan perjanjian resmi dan konfirmasi kepada pihak berwenang diperlukan sebelum pembagian kewenangan ditetapkan. Temuan dokumenter yang dapat disampaikan secara terbatas adalah adanya kebutuhan untuk memperjelas koordinasi dan pemeliharaan.

Arah revitalisasi yang diusulkan

Berdasarkan kebutuhan yang tercatat, arah revitalisasi Pantai Camplong diusulkan secara bertahap. Dalam jangka pendek, kegiatan dapat mencakup pembersihan terjadwal, pencatatan kerusakan, dan perbaikan fasilitas prioritas. Tahap berikutnya dapat berupa penyusunan standar pelayanan sederhana, penyediaan informasi biaya yang mudah dipahami, serta kanal masukan pengunjung. Evaluasi dapat dilakukan melalui inspeksi fasilitas dan survei kepuasan singkat. Keterlibatan pedagang lokal perlu diperhatikan agar perbaikan layanan tidak mengurangi akses penghidupan masyarakat sekitar.

Apabila muncul usulan rehabilitasi vegetasi pantai atau penanaman mangrove, pelaksanaannya harus didahului kajian kesesuaian habitat dan konsultasi dengan ahli terkait. Tidak semua bagian pantai sesuai untuk jenis vegetasi yang sama. Seluruh langkah tersebut merupakan rekomendasi yang perlu dibahas dengan pemangku kepentingan, bukan kegiatan yang telah terbukti dilaksanakan.

Keterkaitan kegiatan perikanan dan kebersihan

Dokumen kuliah lapangan menggambarkan Branta Pesisir sebagai wilayah dengan aktivitas nelayan,

perdagangan ikan, dan usaha masyarakat. Dokumen yang sama mencatat persoalan penumpukan sampah. Keterangan ini memperlihatkan bahwa pengelolaan lingkungan perlu mempertimbangkan hubungan antara kegiatan produksi, perdagangan, dan kehidupan permukiman. Namun, data mengenai volume, komposisi, sumber, dan sebaran sampah belum tersedia. Oleh karena itu, belum dapat ditentukan jenis sarana atau teknologi pengelolaan yang paling sesuai.

Langkah awal yang direkomendasikan ialah pemetaan titik penumpukan sampah, identifikasi sumber sampah, pengamatan waktu timbulan, serta dialog dengan nelayan, pedagang, dan rumah tangga. Hasil pemetaan dapat digunakan untuk menentukan kebutuhan tempat pengumpulan, jadwal pengangkutan, edukasi pemilahan, dan kemungkinan kerja sama pengolahan. Pemetaan tersebut merupakan usulan kegiatan lanjutan, bukan hasil pengukuran yang telah dilakukan dalam penelitian ini.

Penguatan usaha berbasis perikanan

Pengembangan ekonomi lokal di Branta Pesisir dapat diarahkan pada peningkatan mutu penanganan hasil tangkapan, pengemasan produk olahan, pencatatan biaya sederhana, dan perluasan jaringan pemasaran. Bentuk pendampingan tidak sebaiknya disamaratakan karena kebutuhan, keterampilan, modal, dan waktu kerja setiap kelompok dapat berbeda. Oleh sebab itu, penentuan program perlu didahului musyawarah dan pemetaan kebutuhan pelaku usaha. Pandangan ini sejalan dengan Prayogi dan Sari (2019), yang menempatkan masyarakat nelayan sebagai pelaku penting dalam pengembangan kawasan pesisir.

Program percontohan berskala kecil dapat dipertimbangkan bersama kelompok yang bersedia berpartisipasi. Evaluasi perlu menilai manfaat dan beban kerja, keberlanjutan produksi, kualitas produk, serta perubahan akses pasar yang dapat dibuktikan. Kajian Azizah et al. (2026) mengenai pendampingan UMKM di Desa Dasok memberikan pembanding tentang pentingnya kemasan, pemasaran digital, dan inovasi produk lokal. Penerapannya pada produk perikanan Branta Pesisir tetap harus disesuaikan dengan kondisi dan keputusan pelaku usaha setempat. Karena belum tersedia data usaha terperinci, artikel ini belum menyimpulkan peningkatan pendapatan atau keberhasilan pemasaran.

Budaya lokal dan persetujuan masyarakat

Tradisi Laoténg tercantum dalam dokumen awal sebagai bagian dari konteks budaya Branta Pesisir. Naskah skripsi Husna (2023) disebut sebagai rujukan, tetapi rincian bibliografinya masih perlu diverifikasi melalui repositori institusi. Identitas budaya dapat menjadi landasan dialog komunitas. Namun, pemanfaatannya untuk promosi wisata harus memperoleh persetujuan warga yang menjalankan tradisi serta memperhatikan makna budaya bagi masyarakat. Dengan demikian, pemberdayaan Branta Pesisir sebaiknya berpusat pada penguatan kapasitas masyarakat dan kualitas lingkungan. Pengembangan wisata berbasis budaya hanya dapat dipertimbangkan sebagai pilihan yang ditentukan bersama, bukan target yang dipaksakan dari luar.

Tabel 1. Perbandingan kebutuhan dua lokasi

Aspek	Pantai Camplong	Branta Pesisir
Fungsi utama	Rekreasi dan layanan wisata	Permukiman dan ekonomi perikanan
Prioritas	Pemeliharaan fasilitas dan kebersihan	Pengelolaan sampah dan penguatan usaha
Langkah awal	Audit fasilitas	Pemetaan sampah dan kebutuhan warga

Sumber: sintesis penulis dari dokumen kuliah lapangan.

PEMBAHASAN

Perbandingan kedua lokasi memperlihatkan bahwa prioritas revitalisasi tidak dapat diseragamkan. Pantai Camplong memiliki fungsi utama sebagai kawasan rekreasi sehingga isu yang menonjol dalam dokumen

adalah pemeliharaan fasilitas, kebersihan, dan mutu pelayanan pengunjung. Sebaliknya, Branta Pesisir merupakan kawasan permukiman dan kegiatan ekonomi perikanan; isu yang tercatat berkaitan dengan penumpukan sampah, aktivitas nelayan, perdagangan ikan, dan kebutuhan penguatan usaha masyarakat. Persamaan keduanya terletak pada perlunya koordinasi lintas pihak, pembagian tanggung jawab yang jelas, keterlibatan warga, dan pemantauan hasil.

Dari perspektif revitalisasi destinasi, kebutuhan Camplong dapat dianalisis melalui kelayakan sarana, pemeliharaan, informasi layanan, dan penanganan keluhan sebagaimana kerangka yang diturunkan dari Sunaryo (2013). Dari perspektif pemberdayaan, kebutuhan Branta Pesisir menuntut keterlibatan nelayan dan pelaku usaha sejak identifikasi kebutuhan hingga evaluasi, sejalan dengan Prayogi dan Sari (2019). Sementara itu, tata kelola kolaboratif menjadi penghubung kedua kasus: setiap program perlu memiliki pelaksana, pembagian tugas, jadwal, sumber daya, dan mekanisme pertanggungjawaban. Dengan demikian, perbedaan program tidak menghilangkan kebutuhan akan prinsip tata kelola yang sama.

Hasil perbandingan ini masih bersifat dokumenter. Tidak tersedia data yang memungkinkan penilaian kuantitatif mengenai tingkat kerusakan fasilitas, volume sampah, pendapatan warga, atau perubahan jumlah pengunjung. Karena itu, tabel perbandingan dan rencana implementasi harus dibaca sebagai pemetaan awal yang perlu diuji melalui observasi, wawancara, dan pemeriksaan dokumen resmi.

Pemetaan literatur yang tercantum dalam daftar pustaka juga menunjukkan bahwa isu partisipasi masyarakat telah dibahas dalam konteks pariwisata berbasis masyarakat (Asmoro et al., 2021), pengelolaan sampah kawasan wisata pantai (Darmi & Aryanti, 2022; Putri & Setiawan, 2024; Sunartomo & Wahyuningsih, 2024; Yonanda et al., 2025), serta pengembangan wisata pantai dan pemberdayaan masyarakat pesisir (Danuarta et al., 2026; Mamengko & Kuntari, 2020; Nawawi, 2013; Putria et al., 2025; Sukmana et al., 2026). Kajian mengenai peran masyarakat sipil dalam pengelolaan lingkungan pesisir (Sakti, 2022) juga relevan sebagai konteks. Rujukan-rujukan tersebut memperluas konteks pembahasan, tetapi tidak menggantikan kebutuhan untuk memeriksa langsung kondisi di Camplong dan Branta Pesisir.

Tahap Persiapan

Tahap persiapan mencakup verifikasi masalah, pembentukan forum lintas pihak, dan penyusunan daftar prioritas. Di Camplong, verifikasi dilakukan melalui inventarisasi kondisi fasilitas dan klarifikasi pembagian tanggung jawab kepada pengelola serta instansi terkait. Di Branta Pesisir, verifikasi dilakukan melalui pemetaan titik sampah dan diskusi kebutuhan kelompok usaha. Keluaran tahap ini berupa notula, peta atau daftar kondisi awal, serta kesepakatan yang memuat pelaksana, jadwal, sumber daya, dan cara pelaporan.

penyusunan daftar prioritas. Di Camplong, hasil utamanya berupa inventaris sarana dan kesepakatan pemeliharaan. Di Branta Pesisir, hasilnya berupa peta titik sampah serta daftar kebutuhan kelompok usaha. Dokumen kesepakatan perlu menyebut pelaksana, jadwal, sumber daya, dan cara pelaporan.

Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan sebaiknya menggunakan proyek percontohan yang terbatas, terukur, dan dapat disesuaikan. Camplong dapat memulai dari satu kelompok fasilitas prioritas berdasarkan hasil audit. Branta Pesisir dapat memulai dari satu titik pengelolaan sampah dan satu kelompok usaha yang dipilih melalui kesepakatan terbuka. Setiap kegiatan perlu didokumentasikan dengan catatan pelaksanaan, pihak yang terlibat, kendala, dan penggunaan sumber daya. Pemilihan lokasi atau kelompok harus dilakukan secara

transparan agar manfaat dan beban kegiatan tidak hanya terpusat pada pihak tertentu.

Tahap Evaluasi dan Penyesuaian

Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kondisi awal dan kondisi setelah pelaksanaan. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kondisi awal dan kondisi setelah pelaksanaan menggunakan indikator yang telah disepakati. Di Camplong, evaluasi dapat mencakup fungsi fasilitas, keteraturan pemeliharaan, dan tindak lanjut masukan pengunjung. Di Branta Pesisir, evaluasi dapat mencakup jumlah titik sampah yang tertangani, keterlibatan warga, dan keberlanjutan kegiatan usaha. Hasil evaluasi menjadi dasar untuk melanjutkan, memperbaiki, memperluas, atau menghentikan kegiatan yang tidak efektif. Karena program belum dilaksanakan dalam penelitian ini, evaluasi tersebut masih berupa rancangan.

Tabel 2. Rencana implementasi awal

Tahap	Kegiatan dan bukti pemantauan
Persiapan	Validasi isu dan musyawarah; notula dan peta lokasi
Percontohan	Perbaikan sarana, pemilahan sampah, pendampingan usaha; dokumentasi
Evaluasi	Inspeksi dan umpan balik; daftar cek dan laporan kelompok
Penguatan	Revisi prosedur; rencana tindak lanjut

Sumber: usulan penulis, bukan hasil implementasi.

Rencana Implementasi dan Indikator Evaluasi

Rancangan berikut merupakan perangkat perencanaan awal untuk memantau pelaksanaan strategi di kedua lokasi. Indikator perlu ditetapkan bersama pemangku kepentingan sebelum kegiatan dimulai. Periode pengukuran dan target angka harus ditentukan berdasarkan data dasar lapangan serta kemampuan pelaksana. Artikel ini tidak menyatakan adanya capaian program karena intervensi belum dilaksanakan dan belum dievaluasi.

a. Indikator Lingkungan dan Pelayanan

Indikator yang disarankan meliputi proporsi fasilitas prioritas yang berfungsi, keteraturan pembersihan, jumlah titik sampah yang ditangani, dan keberadaan prosedur tindak lanjut keluhan. Pengukuran dilakukan melalui daftar cek sederhana dengan definisi yang konsisten. Tanpa data dasar, perubahan belum dapat dinilai sebagai keberhasilan.

b. Indikator partisipasi dan ekonomi

Partisipasi tidak hanya diukur dari jumlah kehadiran, tetapi juga keterlibatan warga dalam menentukan prioritas dan mengevaluasi kegiatan. Untuk usaha perikanan, indikator dapat berupa keberlanjutan produksi, penerapan pengemasan yang disepakati, dan pencatatan transaksi. Data pendapatan hanya dikumpulkan atas persetujuan pelaku usaha dan diperlakukan secara rahasia.

c. Risiko pelaksanaan

Risiko utama pelaksanaan mencakup ketidakjelasan kewenangan, keterbatasan anggaran, tambahan beban kerja bagi warga, dan rendahnya kesinambungan pemeliharaan. Mitigasi dapat dilakukan melalui penetapan penanggung jawab secara tertulis, pemilihan kegiatan sesuai kapasitas, keterbukaan informasi, dan evaluasi berkala. Program yang menyangkut perubahan fisik kawasan pesisir harus didahului pemeriksaan kesesuaian ekologis dan perizinan yang relevan.

Dari sudut administrasi publik, rancangan ini menekankan proses pengambilan keputusan yang dapat ditelusuri. Masalah perlu didokumentasikan, keputusan disepakati, pelaksanaan dicatat, dan hasil dievaluasi. Prinsip tersebut dapat mengurangi risiko program yang hanya menghasilkan kegiatan sesaat tanpa manfaat yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan tata kelola kawasan pesisir perlu disesuaikan dengan fungsi ruang dan kebutuhan masyarakat. Pada Pantai Camplong, prioritas yang teridentifikasi dalam dokumen adalah

pemeliharaan fasilitas, kebersihan, dan kejelasan pengelolaan layanan wisata. Pada Desa Branta Pesisir, prioritasnya adalah pemetaan serta pengelolaan sampah yang mempertimbangkan aktivitas perikanan, disertai penguatan usaha masyarakat dan pelibatan warga. Dengan demikian, tujuan penelitian terjawab melalui identifikasi perbedaan prioritas dan persamaan kebutuhan tata kelola, yaitu koordinasi, pembagian tanggung jawab, partisipasi, dan pemantauan. Implikasi praktis kajian ini ialah perlunya verifikasi lapangan, forum penetapan prioritas, dan uji coba program secara bertahap dengan indikator yang disepakati. Penelitian lanjutan perlu melibatkan pengelola kawasan, perangkat desa, instansi terkait, nelayan, pedagang, pelaku usaha, dan warga melalui wawancara serta observasi langsung. Keterbatasan penelitian ini adalah ketergantungan pada dokumen kuliah lapangan dan literatur, tanpa transkrip wawancara, data pengukuran lingkungan, maupun statistik kunjungan. Oleh sebab itu, hasilnya bersifat eksploratif dan tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh kawasan pesisir Madura.

DAFTAR PUSTAKA

Asmoro, A. Y., Yusrizal, F., & Saputra, I. (2021).Pariwisata berbasis masyarakat di Desa Sekapuk: Sebuah participatory action research. JPPM (Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat), 8(1). https://doi.org/10.21831/jppm.v8i1.34144

Azizah, R. N., Adi, M. N. P., Tasyukurina, Z., & Al-zubair, N. A. (2026). Strategi pengembangan inovatif dan berkelanjutan pada produk lokal UMKM Desa Dasok Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Jurnal JAMAS, 4(1), 1147–1152. https://jurnal.forindpress.com/index.php/jamas

Danuarta, F., Arifiyanti, N., & Destiarni, R. P. (2026). Partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata pantai di Desa Labuhan Kabupaten Bangkalan. Agridev, 4(2), 106–125. https://doi.org/10.33830/Agridev.v4i2.14433.2026

Darmi, T., & Aryanti, M. (2022). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah pada kawasan wisata pantai. JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari, 3(2). https://doi.org/10.31539/joppas.v3i2.5183

Husna, S. S. (2023). Tradisi adat Malam Sya'ban (Laoténg) masyarakat Desa Branta Pesisir Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan Madura [Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Madura].

Mamengko, R. P., & Kuntari, E. D. (2020). Pengelolaan pariwisata bahari berbasis community-based tourism dalam peningkatan ekonomi masyarakat pesisir. Media Wisata, 18(1). https://doi.org/10.36276/mws.v18i1.72

Nawawi, A. (2013). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata Pantai Depok di Desa Kretek Parangtritis. Jurnal Nasional Pariwisata. https://doi.org/10.22146/jnp.6370

Prayogi, P. A., & Sari, N. L. K. J. P. (2019). Pengembangan daerah pesisir dengan pemberdayaan masyarakat nelayan di kawasan pesisir Kabupaten Badung. Jurnal Manajemen Pelayanan Hotel, 3(1), 17–28. https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1502614

Putri, K. A., & Setiawan, B. (2024). Analisis partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di kawasan wisata bahari Pantai Tanjung Pasir. Jurnal Pariwisata dan Perhotelan. https://doi.org/10.47134/pjpp.v2i1.3321

Putria, H., Zalmita, N., Yulianti, F., & Furqan, M. H. (2025). Partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan wisata Pantai SBB Aceh Selatan. PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, 4(5), 7777–7790. https://doi.org/10.56799/peshum.v4i5.11440

Sakti, W. I. (2022). Peran masyarakat sipil dalam pengelolaan lingkungan pesisir. Jurnal Kelautan dan

Perikanan Terapan. https://doi.org/10.15578/jkpt.v1i0.12058

Sugiyono. (2018). Metode penelitian bisnis: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi dan R&D. Alfabeta.

Sukmana, H., Subianto, A., Abadi, T. W., & Muldiansa, D. V. (2026). Implementasi kebijakan pengembangan wisata bahari dalam pemberdayaan masyarakat pesisir di Tlocor. Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat. https://doi.org/10.47200/jnajpm.v11i2.3871

Sunartomo, A. F., & Wahyuningsih, N. A. (2024). Partisipasi masyarakat pesisir Pantai Payangan dalam pengelolaan sampah di Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. Jurnal Pengabdian Masyarakat Pesisir, 3(1), 29–33. https://doi.org/10.30649/jpmp.v3i1.113

Sunaryo, B. (2013). Kebijakan pembangunan destinasi pariwisata: Konsep dan aplikasinya di Indonesia. Gava Media.

Yonanda, H., Syamsir, S., Khalila, V. M., Fitri, H. A., Putri, M., & Fadhilah, A. (2025). Persepsi masyarakat pesisir terhadap program pengelolaan sampah plastik di Pantai Padang. Jurnal Pendidikan Tambusai, 9(3), 30605–30613. https://doi.org/10.31004/jptam.v9i3.32175